

Kerjasama Regional dalam Dinamika Global: Efektivitas Rezim APEC di Tengah Perang Dagang AS-Tiongkok 2018-2020

Azyumardi Mumtazul Umam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mumtazul.umam.isip22@mail.umy.ac.id

Abstrak — Penelitian ini mengevaluasi efektivitas rezim Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dalam menghadapi dinamika perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok pada periode 2018–2020. Perang dagang yang ditandai dengan kebijakan proteksionisme AS dan ekspansi strategis Tiongkok melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) menciptakan tantangan signifikan bagi stabilitas perdagangan regional. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal untuk menganalisis variabel dependen, independen, dan intervensi dari kebijakan APEC dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun APEC berhasil menyediakan platform untuk dialog multilateral, sifat non-mengikat dari forum ini dan dominasi dua kekuatan besar (AS dan Tiongkok) menghambat pencapaian konsensus yang kuat dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, APEC disarankan memperkuat mekanisme pengawasan kebijakan, mendiversifikasi mitra dagang, serta meningkatkan kolaborasi strategis yang melibatkan negara-negara kecil dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan relevansi APEC dalam mengelola tantangan perdagangan internasional di masa depan.

Kata Kunci — APEC, Efektivitas Rezim, Perang Dagang AS-Tiongkok

1. PENDAHULUAN

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) merupakan forum antar pemerintah yang didirikan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai wadah interaksi multilateral, APEC memainkan peran strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi regional, terutama dengan memfasilitasi perdagangan intra-regional, yang didominasi oleh sektor manufaktur (Hur & Lee, 2017). Forum ini tidak hanya bertindak sebagai katalisator bagi peningkatan arus perdagangan dan investasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung agenda perdagangan global yang diusung oleh WTO (World Trade Organization). Dengan pendekatan yang inklusif, APEC mampu mengakomodasi keberagaman ekonomi dan geografis dari anggotanya, menciptakan ruang untuk dialog konstruktif yang berorientasi pada penyelesaian isu-isu perdagangan internasional yang kompleks. Dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang, APEC tidak hanya relevan sebagai platform kerjasama regional, tetapi juga sebagai aktor utama yang menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam perdagangan lintas batas,

meningkatkan daya saing, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik (Anwar & Jabnoun, 2001).

Dalam dinamika perdagangan internasional yang terus berkembang, APEC memainkan peran penting sebagai forum untuk mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memberikan dampak signifikan

pada stabilitas perdagangan global dan regional. Ketegangan ini mempercepat pergeseran kekuatan ekonomi dari AS ke Asia, dengan Tiongkok menjadi pusat gravitasi baru dalam perekonomian kawasan. Fenomena ini tidak hanya mengubah arsitektur ekonomi global, tetapi juga meningkatkan urgensi bagi negara-negara di Asia Timur dan Pasifik untuk memperkuat kerjasama regional demi menghadapi tantangan bersama. Negara-negara anggota APEC mulai berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan mempercepat integrasi intra-regional yang berorientasi pada peningkatan perdagangan dan investasi di antara sesama anggota. Dalam konteks ini, APEC tidak hanya menjadi platform untuk dialog strategis, tetapi juga alat untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui pengembangan kebijakan yang mendukung perdagangan bebas, diversifikasi pasar, dan interdependensi ekonomi yang lebih erat (Chia, 2009).

Ketegangan perdagangan yang dipicu oleh perang dagang AS-Tiongkok semakin diperparah oleh kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari Tiongkok. Kebijakan ini tidak hanya mengganggu arus perdagangan internasional tetapi juga meningkatkan biaya bagi konsumen dan produsen di seluruh dunia, menciptakan tantangan baru bagi integrasi ekonomi global. Di sisi lain, Tiongkok merespons dinamika ini dengan memperluas pengaruh ekonominya melalui **Belt and Road Initiative (BRI)**, sebuah strategi ambisius yang melibatkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur di kawasan Eurasia dan Indo-Pasifik. BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan memperkuat dominasi Tiongkok di tingkat regional dan global. Meski menawarkan peluang besar untuk pembangunan ekonomi dan investasi, inisiatif ini juga memicu kekhawatiran geopolitik, termasuk persaingan strategis dengan negara-negara besar lainnya di kawasan. Ketegangan ini menciptakan tantangan tambahan bagi stabilitas ekonomi regional, sekaligus menyoroti kebutuhan akan forum multilateral seperti APEC untuk memitigasi dampak negatif dari dinamika global yang semakin kompleks. Sebagai platform dialog, APEC memiliki potensi untuk mengembangkan solusi kooperatif yang mendukung perdagangan bebas, investasi

yang berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian yang terus meningkat (Li, 2020).

Dalam menghadapi tantangan kompleks yang muncul dari ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, evaluasi peran APEC sebagai forum multilateral menjadi semakin krusial. Kebijakan proteksionis AS dan ekspansi strategis Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) telah menciptakan dinamika baru yang memengaruhi stabilitas ekonomi kawasan. Sebagai platform dialog, APEC memiliki potensi untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara anggotanya guna mengurangi ketegangan perdagangan, mendorong liberalisasi ekonomi, dan meningkatkan investasi asing yang dapat menjadi katalisator stabilitas ekonomi regional (Vu et al., 2022). Melalui mekanisme ini, APEC juga mampu mengakomodasi kepentingan beragam anggotanya dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, inovatif, dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, peran APEC dalam mendukung perdagangan bebas dan integrasi regional menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk merespons ketidakpastian global. Dengan menyatukan berbagai negara dalam upaya kolaboratif, APEC berpeluang besar untuk tidak hanya memitigasi dampak perang dagang tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas rezim APEC selama perang dagang AS-Tiongkok. Penelitian ini akan menilai sejauh mana APEC mampu merespon dan mengelola konflik perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas APEC berdasarkan variabel dependen, variabel independen, dan variabel intervensi. Penelitian ini juga akan menawarkan rekomendasi terkait apa saja yang harus ditingkatkan APEC di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep rezim internasional pertama kali diperkenalkan oleh Robert O. Keohane dalam *After Hegemony* (1984), yang mendefinisikan rezim sebagai serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang memungkinkan kerja sama antarnegara. Rezim internasional bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antarnegara melalui kerangka kerja institusional. Kemudian, Stephen Krasner dalam artikelnya *Structural Causes and Regime Consequences* (1982) memperluas pemahaman dengan menekankan bahwa rezim berfungsi sebagai mekanisme koordinasi antara kepentingan negara-negara yang berbeda. Dalam konteks APEC, rezim ini bertindak sebagai fasilitator kerja sama ekonomi, terutama di tengah konflik ekonomi global seperti perang dagang AS-Tiongkok. Krasner juga mengidentifikasi rezim sebagai variabel sela, di mana kekuatan (power) negara anggota memengaruhi hasil (outcome) kerja sama yang dicapai.

Asia-Pasifik merupakan kawasan dengan tingkat integrasi ekonomi yang dinamis. Baldwin (1997) dalam bukunya *Regionalism vs Multilateralism* menyatakan bahwa organisasi seperti APEC menjadi platform penting untuk memperkuat perdagangan bebas, terutama bagi negara-negara berkembang yang bergabung dalam rantai nilai global. Krugman (1991) menjelaskan dalam *The Move Towards Free Trade Zones* bahwa kawasan perdagangan bebas yang diinisiasi oleh organisasi regional mampu mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan daya saing global, dan mendorong investasi lintas batas. Dalam konteks APEC, hal ini menjadi signifikan karena perang dagang AS-Tiongkok mengancam stabilitas perdagangan di kawasan ini.

Perang dagang AS-Tiongkok pada periode 2018–2020 merupakan salah satu dinamika global yang paling signifikan dalam sejarah perdagangan internasional kontemporer. Dipicu oleh kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump, perang dagang ini mengedepankan agenda nasionalisme ekonomi, termasuk penerapan tarif tinggi dan pembatasan akses pasar terhadap produk dari Tiongkok. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS, melindungi industri domestik, dan mengatasi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh Tiongkok, seperti transfer teknologi paksa dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Kholid, 2022). Efek domino perang dagang tersebut terasa di seluruh dunia, mengganggu rantai pasokan global dan memengaruhi kinerja ekonomi banyak negara, termasuk anggota APEC. Studi berbasis model ekonomi seperti matriks akuntansi sosial-pengganda telah digunakan untuk mensimulasikan dampaknya terhadap output ekonomi dan lapangan kerja, menunjukkan bahwa perang dagang menciptakan ketidakpastian yang signifikan dalam pasar internasional (Itakura, 2020). Peran rezim regional seperti APEC menjadi penting dalam konteks ini untuk memitigasi dampak tersebut dan menjaga stabilitas perdagangan.

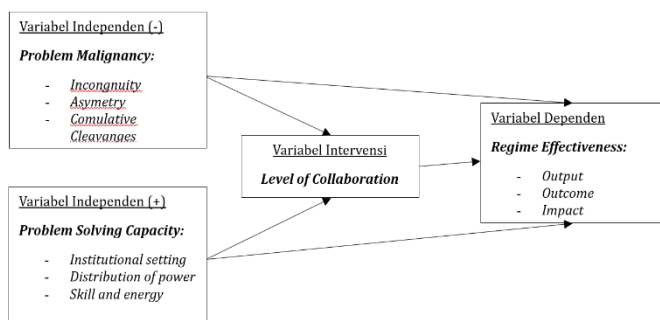
Penelitian sebelumnya tentang efektivitas rezim internasional memberikan wawasan berharga untuk membangun kerangka analisis untuk mengkaji APEC dalam penelitian ini. Firda Ainun Aula (2023) dalam *"Efektivitas Rezim Comfort Women Agreement Antara Jepang Dan Republic of Korea (ROK) Dalam Penyelesaian Masalah Jugun Ianfu di Republic Of Korea (Rok)"* memberikan pengetahuan baru tentang orientasi kepentingan rezim, terutama kepentingan politik yang cenderung membawa kegagalan karena menitikberatkan pada lingkup yang salah. Yang mengindikasikan bahwa orientasi yang bukan pada isunya dapat mempengaruhi efektifitasnya. Lalu, Shela Aprilia (2017) dalam *"Efektivitas Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (Recaap) Dalam Penanganan Kasus Pembajakan Kapal dan Perampokan Bersenjata di Asia Tenggara Tahun 2012-2015"* menunjukkan bahwa kerja sama regional yang didukung dengan mekanisme berbagi informasi dapat meningkatkan efektifitas rezim. Sehingga nantinya akan mempengaruhi *level of collaboration* dalam rezim itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan metode kualitatif deskriptif analitis dengan menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal. Penggunaan metode kualitatif berguna dalam pencarian untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala pokok permasalahan (Creswell & Creswell, 2018). Lalu, penelitian berbasis pendekatan deskriptif analitis ini mampu untuk menjelaskan fakta empirik yang didampingi dengan argumen yang logis dan sistematis. Hasil uraian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penelitian untuk menghasilkan simpulan analitis.

Metode kualitatif deskriptif analisis dalam penelitian ini akan menjelaskan performa dari kinerja APEC dalam mempertahankan mandatnya di tengah pengaruh gejala perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok 2018-2020 pada kawasan Asia-Pasifik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah termasuk jurnal elektronik baik jurnal dalam negeri maupun jurnal internasional, dan artikel berita internasional dari media massa terpercaya yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang kajian ini (Neuman, 2014).

Menggunakan Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal sebagai pisau analisis. Penelitian ini akan mengukur efektivitas APEC menggunakan tiga variabel yaitu variabel dependen, independen, dan intervensi. Dimulai dari variabel dependen dimana terdapat 3 komponen yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Dilanjutkan dengan variabel independen (-) atau *Problem Malignancy* yang terdiri dari 3 komponen antara lain *incongruity*, *asymmetry*, dan *cumulative cleavages* (Miles et al., 2001). Lalu, variabel independen (+) *problem solving capacity* yang terdiri dari 3 unsur yaitu, *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy* (yang digunakan dalam menangani permasalahan). Dan terakhir, variabel intervensi. Yang mengemukakan 6 skala ukuran *level of collaboration*, yang dimulai dari skala 0 “gagasan tanpa koordinasi” sampai skala 6 “koordinasi dan implementasi yang terintegrasi dengan penilaian terpusat”.



Gambar 1. variabel efektivitas rezim arild underdal

Terkait Variabel *Problem Malignancy* terdapat tiga indikator utama. Pertama *Incongruity* atau perbedaan pemahaman tentang tujuan APEC yang menjadi kendala utama. APEC dirancang sebagai forum non-mengikat untuk mempromosikan perdagangan bebas di Asia-Pasifik. Namun, perang dagang mengaburkan fokus ini, mengubah APEC menjadi arena negosiasi kepentingan nasional yang saling bertentangan. Ketidakjelasan tentang bagaimana APEC seharusnya merespons perang dagang, apakah dengan pernyataan netral atau mediasi aktif, memperlihatkan ketidaksepahaman di antara anggota mengenai prioritas forum ini. Kedua *Asymmetry*, ketimpangan kepentingan nasional di antara anggota semakin tajam. Negara-negara kecil di Asia-Pasifik menghadapi tekanan untuk berpihak pada AS atau Tiongkok, mengingat ketergantungan mereka pada salah satu pihak sebagai mitra dagang utama. AS, dengan kebijakan proteksionisme nya, dan Tiongkok, dengan Belt and Road Initiative (BRI), membawa dinamika geopolitik yang membuat APEC lebih rentan terhadap rivalitas daripada kolaborasi. Ketiga *Cumulative Cleavages*, perbedaan-perbedaan yang terakumulasi semakin memperparah ketegangan. Ini termasuk disparitas ekonomi, perbedaan kapasitas anggaran untuk menerapkan kebijakan perdagangan bebas, dan tingkat integrasi ekonomi yang tidak merata. Perang dagang memperburuk situasi, memunculkan blok-blok dalam APEC yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan solidaritas regional.

Sementara itu, variabel yang mempengaruhi efektivitas sebuah rezim adalah *Problem Solving Capacity*. Indikator *Problem Solving Capacity* menggambarkan kemampuan APEC untuk menangani tantangan ini. Pertama, *Institutional Setting*, APEC dirancang sebagai platform konsensus, bukan forum berbasis perjanjian formal. Ini memberikan fleksibilitas tetapi juga kelemahan dalam menghadapi konflik besar seperti perang dagang. APEC tidak memiliki mekanisme penegakan aturan yang kuat, sehingga upaya untuk merumuskan respons kolektif terhadap proteksionisme AS atau ekspansi Tiongkok menjadi sulit. Kedua *Distribution of Power*, ketimpangan kekuatan di dalam APEC sangat nyata. AS dan Tiongkok, sebagai dua aktor dominan, sering kali mendikte agenda forum. Negara-negara kecil cenderung kehilangan suara dalam menentukan kebijakan strategis, mengingat dominasi AS dan Tiongkok dalam perdagangan dan investasi regional. Dan terakhir *skill and energy*, APEC memiliki jaringan ahli dan profesional dari berbagai sektor ekonomi, tetapi peran mereka dalam perang dagang ini kurang optimal. Tidak adanya kepemimpinan strategis yang kuat dari salah satu aktor atau kelompok dalam APEC membuat inisiatif untuk merespons perang dagang menjadi terbatas pada diskusi-diskusi tanpa hasil implementasi nyata.

Demikian, *Problem Malignancy* dan *Problem Solving Capacity* yang akan mempengaruhi variabel intervensi *level of collaboration*. *Problem malignancy* yang tinggi dan kapasitas penyelesaian masalah yang terbatas mengakibatkan level kolaborasi APEC cenderung berada pada skala 2 hingga 3. Aturan eksplisit mengenai

perdagangan bebas memang ada, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara tanpa evaluasi terpusat. Untuk mencapai level kolaborasi yang lebih tinggi, APEC harus meningkatkan koordinasi strategis, terutama dalam membangun mekanisme evaluasi yang terpusat dan mengurangi ketergantungan pada dua kekuatan utama. Langkah ini dapat membantu APEC mengembangkan respons kolektif yang lebih solid dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan global seperti perang dagang AS-Tiongkok

TABEL I. SKALA KOLABORASI EFEKTIVITAS REZIM ARILD UNDERDAL

| Skala Kolaborasi | Keterangan |
|------------------|---|
| 0 | Adanya perundingan bersama tanpa tindakan bersama |
| 1 | Koordinasi tindakan atas dasar pemahaman diam-diam |
| 2 | Adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi penerapannya berada seutuhnya di tangan pemerintah nasional. Sehingga tidak ada penilaian yang terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi |
| 3 | Adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi penerapannya berada seutuhnya di tangan pemerintah nasional. Terdapat penilaian terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi |
| 4 | Koordinasi yang dijalankan terencana, digabungkan dengan penerapan pada tingkat nasional. Dibarengi dengan penilaian yang sifatnya terpusat untuk mengukur efektivitas tindakan |
| 5 | Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi penuh, dengan penilaian efektivitas yang terpusat. |

Sumber: (Rizkiyana, 2022)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Berdasarkan Komponen Dependen

a. Output

Dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung dari tahun 2018 hingga 2020, efektivitas rezim Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dapat dianalisis melalui komponen output, yang mencakup keluaran konkret seperti perjanjian, deklarasi, atau kebijakan yang dihasilkan. Output APEC selama periode ini terlihat dalam berbagai deklarasi bersama yang dihasilkan dari pertemuan tahunan. Misalnya, pada pertemuan APEC di Papua Nugini pada tahun 2018, pemimpin negara anggota berusaha untuk menegaskan komitmen mereka terhadap perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi. Dalam deklarasi tersebut, Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya menghindari proteksionisme dan menyerukan perlunya konsultasi untuk menyelesaikan konflik perdagangan. Ia menyatakan bahwa "tidak ada pemenang dalam perang dagang," menggarisbawahi perlunya pendekatan kolaboratif untuk mengatasi ketegangan yang ada (DW, 2018).

Namun, meskipun ada upaya untuk mencapai konsensus dalam deklarasi tersebut, isi dari dokumen

sering kali terbatas akibat dominasi kepentingan nasional dari anggota besar seperti AS dan Tiongkok. Keterbatasan ini terlihat dalam ketidakmampuan APEC untuk menghasilkan kebijakan yang lebih konkret dan terkoordinasi dalam menghadapi ketegangan perdagangan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota lebih cenderung mengedepankan kepentingan nasional mereka daripada mencapai kesepakatan kolektif.

TABEL 2. DEKLARASI VS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APEC 2018-2020

| Tahun | Jumlah Deklarasi | Kebijakan yang Diimplementasikan | Kebijakan deklaratif |
|-------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2018 | 10 | 4 | 6 |
| 2019 | 12 | 5 | 7 |
| 2020 | 8 | 3 | 5 |

Data menunjukkan bahwa selama periode perang dagang AS-Tiongkok (2018–2020), APEC menghasilkan sejumlah deklarasi yang mengalami fluktuasi, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 12 deklarasi, sebelum menurun menjadi 8 deklarasi pada tahun 2020. Meskipun jumlah deklarasi cukup signifikan, hanya sebagian kecil yang diimplementasikan menjadi kebijakan oleh negara anggota, dengan 4 kebijakan pada 2018, 5 kebijakan pada 2019, dan 3 kebijakan pada 2020. Ketimpangan antara jumlah deklarasi dan implementasi ini mencerminkan tantangan utama APEC dalam mentransformasikan komitmen multilateral menjadi tindakan konkret, terutama di tengah dinamika rivalitas ekonomi antara AS dan Tiongkok (Capie et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun APEC berfungsi sebagai platform dialog strategis, sifatnya yang non-mengikat membatasi efektivitasnya dalam menciptakan kebijakan terkoordinasi di kawasan.

Salah satu tantangan utama dalam output APEC adalah tidak adanya mekanisme formal untuk memastikan implementasi kebijakan yang disepakati. Meskipun APEC memiliki berbagai inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi hambatan perdagangan, kurangnya komitmen dan mekanisme pengawasan yang kuat membuat banyak kebijakan tidak terlaksana secara efektif. Hal ini menciptakan tantangan bagi negara-negara anggota dalam mencapai hasil nyata dari deklarasi yang telah dibuat. Sebagai contoh, meskipun terdapat upaya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, banyak negara anggota masih menghadapi kesulitan dalam menavigasi kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti AS (Kennedy, 2024). Demikian, meskipun APEC menghasilkan berbagai output dalam bentuk deklarasi dan inisiatif selama perang dagang AS-Tiongkok, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional anggota besar dan kurangnya mekanisme implementasi yang efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan APEC untuk berfungsi sebagai platform kerjasama yang efektif dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.

b. Outcome

Outcome dalam konteks efektivitas rezim Asia-Pacific

Economic Cooperation (APEC) merujuk pada implementasi dan perubahan perilaku anggota APEC berdasarkan output yang dihasilkan. Selama periode perang dagang AS-Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2020, respons anggota APEC terhadap kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh AS serta strategi Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh Tiongkok menjadi sangat relevan dalam menilai outcome APEC.

Anggota APEC menunjukkan berbagai reaksi terhadap kebijakan proteksionis AS, terutama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang mengedepankan agenda "America First." Dalam konteks ini, negara-negara anggota APEC, terutama yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan Tiongkok, seperti Vietnam dan Malaysia, terpaksa menyesuaikan strategi perdagangan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Menurut laporan APEC yang berjudul "Win, Lose or Draw: Estimating the Impact of Trade Disengagement on APEC Trade," menunjukkan bahwa fragmentasi geoekonomi, yang dipicu oleh kebijakan restriktif antar blok ekonomi, dapat merugikan semua pihak, termasuk negara-negara netral yang mengakibatkan jumlah hambatan perdagangan di kawasan meningkat secara signifikan selama periode ini, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi negara-negara anggota dalam menavigasi ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia (Andreas et al., 2024)

Vietnam berhasil meningkatkan ekspor ke AS meskipun ada tarif tinggi yang dikenakan pada barang-barang Tiongkok. Hal ini menunjukkan adaptasi anggota terhadap kondisi perdagangan yang berubah dan upaya untuk memanfaatkan peluang di pasar lain. Sebuah artikel dari Vietnam Briefing mencatat bahwa Vietnam telah menerapkan strategi diversifikasi perdagangan dengan fokus pada penguatan hubungan dagangnya dengan negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS (Samuel, 2022). Ini mencerminkan respons proaktif Vietnam dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionis.

Di sisi lain, strategi BRI Tiongkok juga mempengaruhi perilaku anggota APEC. Negara-negara seperti Peru dan Chile semakin mendekati diri kepada Tiongkok melalui investasi infrastruktur yang ditawarkan dalam kerangka BRI. Menurut China Briefing, kedekatan ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan yang berlebihan pada investasi Tiongkok dan potensi dampak negatif terhadap kedaulatan ekonomi (Xiao, 2024). Dalam hal ini, APEC berperan sebagai platform untuk mendiskusikan dan mengevaluasi dampak dari inisiatif tersebut. Namun, efektivitasnya dalam menghasilkan konsensus di antara anggota sering kali terhambat oleh perbedaan kepentingan nasional.

Kemudian, terdapat kebijakan APEC Business Travel Card (ABTC) atau sering di singkat KPP yang merupakan upaya untuk memfasilitasi mobilitas

perdagangan antar anggota. Kebijakan ini berdasarkan pada poin ketujuh dari Bogor Goals tahun 1994, yang menekankan pada liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, serta kerjasama ekonomi dan teknik. Meskipun KPP APEC mulai diberlakukan di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2003, implementasinya mengalami kendala. Salah satu masalah utama adalah tidak maksimalnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan KPP APEC menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini terlihat dari sedikitnya pengusaha yang memanfaatkan fasilitas KPP APEC, yang seharusnya dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas dalam perdagangan internasional (Pusdatin, 2024)

Namun, salah satu temuan utama dalam analisis outcome APEC adalah tingkat implementasi kebijakan yang rendah akibat ketimpangan kekuatan dan orientasi kepentingan nasional di antara anggotanya. Meskipun APEC menghasilkan berbagai output berupa deklarasi dan inisiatif, banyak negara anggota tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten. Misalnya, meskipun ada kesepakatan untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi, laporan menunjukkan bahwa jumlah hambatan perdagangan di kawasan meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Data dari APEC mencatat bahwa jumlah hambatan perdagangan meningkat dari 276 pada akhir 2019 menjadi 345 pada akhir 2020 (Magnier & Patrick, 2024), mencerminkan tantangan besar dalam mencapai hasil yang diharapkan dari kebijakan yang telah disepakati.

c. Impact

Impact dalam aplikasi teori efektivitas rezim Arild Underdal mengacu pada dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu rezim, yang dalam konteks ini adalah stabilitas perdagangan di Asia-Pasifik. Minimnya respon terintegrasi dari APEC terhadap dinamika global seperti perang dagang AS-Tiongkok, berpotensi menciptakan ketidakstabilan perdagangan dalam jangka panjang. Rivalitas yang semakin intensif antara AS dan Tiongkok menjadi salah satu ancaman utama bagi stabilitas ini. Perspektif Game Theory menggambarkan situasi ini sebagai Prisoner's Dilemma, di mana para aktor lebih tergoda untuk membelot (defect) demi keuntungan jangka pendek daripada bekerja sama untuk mencapai hasil optimal. Kebijakan unilateral seperti hambatan perdagangan dan pemisahan teknologi mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya merugikan kedua kekuatan besar tersebut dan negara-negara kecil yang bergantung pada keduanya (Phijaisanit, 2024).

Dampak rivalitas ini juga memengaruhi kebijakan negara-negara anggota APEC secara signifikan. AS dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan dominan, sering kali gagal mencapai konsensus dalam forum multilateral. Hal ini berdampak pada stagnasi dalam pencapaian tujuan perdagangan bebas, inti dari keberadaan APEC. Ketidakpastian ini mendorong banyak negara anggota untuk memprioritaskan hubungan bilateral dibandingkan

mencari solusi kolektif melalui APEC, meskipun forum ini menawarkan potensi kerja sama yang lebih luas. Selain itu, struktur multilateral APEC yang longgar memperburuk situasi ini. Dengan sifatnya yang non-mengikat, keputusan APEC sering kali tidak menghasilkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara luas. Walaupun fleksibilitas ini menjadi keunggulan di masa lalu, rivalitas AS-Tiongkok membuat struktur seperti ini semakin tidak efektif untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam mencapai stabilitas perdagangan regional (Idrus et al., 2020). Fragmentasi geoekonomi yang dihasilkan dari situasi ini juga menjadi ancaman yang signifikan. Jika negara-negara anggota APEC terpecah menjadi blok-blok ekonomi eksklusif yang saling membatasi perdagangan, dampaknya bisa sangat merugikan. Volume perdagangan lintas batas diperkirakan akan menurun secara drastis, yang tidak hanya merugikan negara kecil tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan (Andreas et al., 2024).

B. Faktor Penghambat (Problem Malignancy)

a. Incongruity

Incongruity merujuk pada perbedaan pemahaman dan tujuan antar anggota mengenai peran APEC dalam perang dagang. APEC terdiri dari negara-negara dengan latar belakang ekonomi, politik, dan budaya yang beragam, sehingga terdapat ketidakselarasan dalam bagaimana masing-masing negara mendefinisikan peran dan tanggung jawab organisasi ini. Sebagai contoh, beberapa anggota mungkin mengharapkan APEC untuk mengambil posisi yang lebih proaktif dalam menangani isu-isu perdagangan global, sementara anggota lainnya lebih cenderung untuk mengedepankan kepentingan nasional mereka sendiri. Laporan dari Brookings Institution (1997) menyoroti bahwa perbedaan ini menciptakan tantangan dalam mencapai konsensus di antara anggota, yang pada gilirannya menghambat kemampuan APEC untuk merespons secara efektif terhadap perkembangan global yang cepat (Lincoln & Flamm, 1997). Salah satu temuan utama dari kasus ini adalah saat APEC mengadakan pertemuan puncak di Port Moresby pada tahun 2018, ketegangan antara AS dan Tiongkok mendominasi agenda, dengan kedua negara saling menuduh satu sama lain menerapkan kebijakan proteksionis. Dalam laporan dari Asia Society, dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah APEC, para pemimpin gagal mencapai kesepakatan pada teks *Komuniké Bersama* karena perbedaan pandangan yang mendasar mengenai praktik perdagangan yang adil dan perlindungan (Ivanov, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ketika dua kekuatan besar tidak dapat menemukan titik temu, hal tersebut menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di antara anggota lainnya. Dari perspektif yang lebih luas, pernyataan Presiden Xi Jinping dan Wakil Presiden Mike Pence selama pertemuan tersebut mencerminkan dua visi yang saling bertentangan untuk kawasan Asia-Pasifik. Xi menggunakan istilah "Asia-Pasifik," sementara Pence

memilih istilah "Indo-Pasifik," yang menunjukkan perbedaan strategis yang dalam antara kedua negara. Ketidaksiharasan ini mempersulit dialog yang konstruktif dan berpotensi menghambat kemajuan APEC dalam mencapai tujuan bersama (Ivanov, 2018). Ketidaksiharasan ini tidak hanya menciptakan kebingungan dalam pengambilan keputusan tetapi juga mengurangi legitimasi APEC sebagai forum kerjasama regional.

b. Asymmetry

Ketimpangan kepentingan (*asymmetry*) antara anggota besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dengan negara-negara kecil di APEC menjadi salah satu tantangan utama dalam perang dagang AS-Tiongkok (2018-2020). Konflik ini memperlihatkan bagaimana rivalitas antara dua ekonomi terbesar dunia dapat mengesampingkan kepentingan kolektif dan memengaruhi dinamika organisasi multilateral seperti APEC. Sebagai dua pemain utama di APEC, AS dan Tiongkok sering kali mendikte agenda perdagangan, sementara negara-negara kecil di kawasan cenderung tersingkir dari pengambilan keputusan strategis. Perang dagang menyebabkan eskalasi tarif perdagangan oleh kedua negara, dengan AS memberlakukan tarif pada lebih dari \$250 miliar produk dari Tiongkok, dan Tiongkok merespons dengan tarif balasan pada \$110 miliar produk dari AS (Zhou, 2023). Dampak dari kebijakan ini bukan hanya merugikan perdagangan bilateral tetapi juga menciptakan ketidakpastian besar dalam rantai pasok global, yang sangat memengaruhi negara-negara kecil yang tergabung dalam APEC. Tiongkok, melalui inisiatif Belt and Road (BRI), menawarkan investasi besar kepada negara-negara berkembang di kawasan, tetapi sering kali disertai risiko utang yang signifikan. Di sisi lain, proteksionisme AS memaksa negara-negara kecil untuk menyesuaikan hubungan dagang mereka demi menghindari dampak kebijakan tarif. Struktur non-mengikat APEC memperburuk situasi ini, karena ketidakmampuan rezim untuk memfasilitasi konsensus yang kuat antara AS dan Tiongkok mendorong negara-negara kecil beralih ke hubungan bilateral untuk mengurangi dampak perang dagang. Implikasi dari ketimpangan ini terlihat pada fragmentasi geoekonomi di Asia-Pasifik, di mana negara-negara mulai membentuk blok perdagangan eksklusif yang melemahkan solidaritas regional, meskipun beberapa negara kecil mencoba memanfaatkan perubahan aliran perdagangan global dengan hasil yang tidak merata dan hanya bersifat jangka pendek (Fajgelbaum & Khandelwal, 2021).

c. Cumulative Cleavages

Asymmetry juga diperburuk oleh *cumulative cleavages* yang mencakup akumulasi perbedaan ekonomi, kapasitas, dan tingkat integrasi antar anggota. Negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda sering kali memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda pula. Misalnya, negara-negara berkembang mungkin lebih fokus pada isu-isu seperti akses pasar dan bantuan teknis, sementara negara-negara maju lebih tertarik pada liberalisasi perdagangan dan investasi. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat

menyebabkan ketegangan dalam negosiasi dan menghambat kemajuan menuju tujuan bersama (Cardenas & Buranakanits, 1999). Sebagai contoh, laporan APEC menunjukkan bahwa meskipun negara-negara berkembang telah berusaha untuk terlibat dalam dialog perdagangan, mereka sering kali menghadapi hambatan struktural yang membuat partisipasi mereka menjadi kurang efektif. Dengan kata lain, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kerjasama antar anggota, ketimpangan dalam kapasitas ekonomi dan sumber daya tetap menjadi penghalang yang signifikan.

C. Kapasitas Penyelesaian Masalah (Problem-Solving Capacity)

a. Institutional Setting

APEC didirikan sebagai forum konsensus non-mengikat, memberikan fleksibilitas kepada anggotanya dalam merumuskan kebijakan bersama (APEC, 1995). Namun, dalam konteks perang dagang AS-Tiongkok, desain institusional ini justru menjadi kelemahan signifikan. Struktur yang tidak memiliki mekanisme penegakan hukum atau pengawasan implementasi kebijakan menghambat kemampuan APEC untuk memberikan respons kolektif terhadap eskalasi tarif yang berdampak luas pada perdagangan kawasan. Ketiadaan kewajiban formal menyebabkan anggota lebih memilih tindakan unilateral atau bilateral, melemahkan fungsi APEC sebagai fasilitator multilateral

b. Distribution of Power

Ketimpangan kekuatan antara AS, Tiongkok, dan negara-negara kecil semakin memperburuk efektivitas APEC. Sebagai dua ekonomi dominan, AS dan Tiongkok sering kali memengaruhi arah kebijakan forum sesuai dengan kepentingan nasional mereka, sementara negara-negara kecil, yang sangat bergantung pada perdagangan dengan keduanya, kehilangan pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis. Dominasi ini menciptakan dilema bagi negara-negara kecil, yang harus memilih berpihak pada salah satu kekuatan atau mengambil langkah untuk memitigasi dampak perang dagang melalui jalur bilateral. Dalam kasus ini, Underdal mengatakan bahwa ketika terdapat pihak yang lebih dominan dalam sebuah rezim, demikian itu disebut hegemoni (Miles et al., 2001).

c. Skill and Energy

Setiap kerangka kerja sama yang dibentuk, salah satu unsur yang diperlukan untuk adalah skill dan energy. Menurut Underdal, semakin besar kapasitas skill dan energy sebuah rezim, maka peluang untuk menghadirkan rezim yang efektif akan semakin terjamin. Dalam konteks APEC kurangnya kepemimpinan strategis dalam APEC menjadi faktor penghambat dalam kapasitas penyelesaian masalah. Meskipun terdapat potensi besar bagi APEC untuk berperan sebagai mediator dalam ketegangan antara AS dan Tiongkok, kurangnya inisiatif konkret dari pemimpin negara anggota membuat forum ini kehilangan momentum. Dalam konteks ini, Eko Listyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa "meskipun

rivalitas ini akan tetap ada, pendekatan baru dalam diplomasi dagang oleh AS dan China akan menjadi angin segar bagi rencana-rencana APEC" (Idrus et al., 2020). Namun, tanpa kepemimpinan yang kuat dan visi bersama dari negara-negara anggota, potensi tersebut sulit untuk diwujudkan. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakpastian politik di tingkat domestik di banyak negara anggota, yang sering kali mengalihkan perhatian dari komitmen terhadap kerjasama multilateral. Dalam konteks ini, penting bagi APEC untuk menemukan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai kepentingan anggota dan mendorong langkah-langkah konkret menuju solusi bersama.

D. Level Kolaborasi

Kolaborasi yang dicapai oleh APEC selama perang dagang AS-Tiongkok (2018-2020) dapat dievaluasi berdasarkan Tabel 1 yang mana berada pada skala menengah, yaitu 2-3 menurut teori efektivitas rezim Arild Underdal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kesepakatan bersama dan tindakan kolektif pada beberapa isu, implementasi kebijakan tersebut belum merata dan tidak sepenuhnya terintegrasi di seluruh kawasan. Persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok menjadi penghalang utama bagi kolaborasi yang lebih efektif dalam APEC. Rivalitas ini menciptakan perpecahan di antara negara-negara anggota, sehingga sulit untuk mencapai konsensus dalam isu-isu perdagangan. Situasi ini menyebabkan APEC kehilangan efektivitasnya dalam berfungsi sebagai forum multilateral untuk menetapkan kesepakatan perdagangan bebas. Lebih jauh lagi, rivalitas tersebut mendorong banyak anggota APEC untuk lebih mengandalkan hubungan bilateral daripada bekerja melalui kerangka multilateral yang disediakan oleh APEC. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan regional belum terintegrasi secara menyeluruh, dengan masing-masing negara anggota memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Kelemahan utama dalam struktur APEC adalah kurangnya mekanisme penilaian terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan kolektif benar-benar diterapkan secara konsisten oleh semua negara anggota. Pada skala kolaborasi level 2, koordinasi lebih bersifat deklaratif, di mana aturan dan standar bersama dirumuskan, tetapi implementasinya bergantung sepenuhnya pada kebijakan nasional masing-masing anggota tanpa adanya pengawasan bersama yang kuat. Hal ini membuat kebijakan APEC sering kali tidak berdampak langsung atau merata pada stabilitas perdagangan di kawasan. Selain itu, tantangan koordinasi di dalam APEC juga diperburuk oleh kurangnya visi bersama, terutama dari negara-negara ASEAN yang berperan sebagai blok penting dalam APEC. Walaupun ASEAN memiliki potensi untuk menyatukan kepentingan negara-negara kecil, koordinasi mereka di dalam forum ini masih perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang ekonomi regional. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa APEC berada pada tingkat kolaborasi yang belum optimal, dengan tantangan mendasar berupa persaingan kekuatan

besar, kelemahan struktural, dan fokus anggota yang lebih condong pada pendekatan bilateral. Untuk meningkatkan skala kolaborasi, APEC perlu mengembangkan mekanisme penilaian terpusat dan memperkuat komitmen anggotanya terhadap implementasi kebijakan bersama secara lebih terintegrasi.

E. Implikasi dan Rekomendasi

a. Implikasi

Berdasarkan analisis efektivitas rezim APEC menggunakan kerangka teori Arild Underdal, dapat disimpulkan bahwa APEC belum sepenuhnya efektif dalam merespons perang dagang AS-Tiongkok. Meskipun forum ini berhasil menyediakan platform untuk dialog multilateral, langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak perang dagang masih minim. Kelemahan struktural seperti sifat konsensus non-mengikat dan dominasi AS-Tiongkok telah menghambat APEC dalam mencapai koordinasi dan implementasi kebijakan yang terintegrasi di seluruh kawasan.

b. Rekomendasi

1. Meningkatkan mekanisme koordinasi strategis APEC dapat dilakukan dengan cara, pertama, APEC perlu memperhatikan keterlibatan negara-negara kecil dengan meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan, karena negara-negara kecil sering kali kesulitan untuk bersaing dalam forum besar yang didominasi oleh negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok. Sebagai contoh, penguatan peran ASEAN dalam APEC bisa menjadi langkah awal yang tepat. Mengingat ASEAN memiliki sejumlah negara berkembang yang memiliki kepentingan serupa dalam integrasi ekonomi, penguatan peran ASEAN dapat menciptakan blok koordinasi yang lebih kohesif yang menyuarakan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih merata di seluruh kawasan. Kedua, APEC perlu memperjelas prioritas kebijakan yang diusung dalam setiap pertemuan tahunan, memastikan bahwa agenda yang dibahas tetap relevan dengan isu-isu perdagangan yang paling mendesak. Mitigasi dampak tarif dan stabilitas rantai pasokan adalah dua isu yang sangat penting di tengah perang dagang AS-Tiongkok. Oleh karena itu, dalam setiap pertemuan APEC, negara-negara anggota perlu secara eksplisit menyusun prioritas kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbicara mengenai perdagangan, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak ekonomi jangka panjang bagi negara-negara anggota.
2. Diversifikasi aliansi ekonomi dapat menjadi langkah konkret yang APEC perlu ambil. Negara-negara anggota, terutama yang lebih

kecil, harus didorong untuk memperluas mitra dagang mereka di luar AS dan Tiongkok. Diversifikasi ini akan memperkuat posisi tawar negara-negara kecil dalam negosiasi perdagangan internasional. Sebagai contoh, kerja sama dengan negara-negara non-APEC atau memperluas kemitraan dengan negara-negara di luar kawasan Asia-Pasifik dapat memperkenalkan perspektif yang lebih seimbang dalam kebijakan APEC. Selain itu, APEC bisa mengambil inspirasi dari Forum ASEAN + 3, yang menyatukan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk blok ekonomi yang lebih berimbang. Menggunakan pendekatan serupa, APEC dapat menciptakan forum diskusi yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan yang lebih serupa untuk lebih terlibat dalam pengambilan kebijakan.

3. APEC perlu mendirikan Komite Pengawasan Kebijakan yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara terpusat. Komite ini akan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengumpulan data terkait pelaksanaan kebijakan, serta menganalisis kinerja negara anggota untuk memastikan kebijakan yang disepakati dapat berjalan dengan baik. Selain itu, mengadopsi indikator kinerja kolektif yang terukur, seperti pengurangan hambatan tarif atau peningkatan volume perdagangan, akan membantu negara-negara anggota untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan melaporkan hasil implementasi kebijakan secara terbuka dalam forum tahunan APEC, yang memberikan kepercayaan kepada anggota dan memastikan adanya komitmen yang lebih kuat terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
4. APEC bisa membentuk APEC Business Advisory Group, yang terdiri dari perwakilan sektor swasta untuk memberikan masukan tentang kebijakan perdagangan dan investasi yang sedang dirumuskan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan oleh APEC akan lebih selaras dengan kebutuhan nyata pasar dan bisnis di kawasan. Selain itu, APEC dapat menyelenggarakan forum tahunan yang melibatkan sektor bisnis, di mana sektor swasta dapat berpartisipasi dalam evaluasi kebijakan perdagangan dan mencari solusi bersama terhadap hambatan yang ada. Kolaborasi ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan pelaku bisnis, serta mendorong pemecahan masalah secara lebih praktis dan berbasis pada kebutuhan ekonomi yang ada di lapangan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, APEC dapat memperkuat posisinya sebagai forum yang lebih efektif dalam merespons dinamika perdagangan global, mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar, dan meningkatkan

akuntabilitas serta transparansi dalam kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, memperkuat dialog dan kerjasama antara sektor publik dan swasta akan memastikan kebijakan yang diterapkan dapat lebih aplikatif dan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas rezim APEC dalam merespons tantangan signifikan yang ditimbulkan oleh perang dagang AS-Tiongkok pada periode 2018–2020. Temuan menunjukkan bahwa meskipun APEC berfungsi sebagai platform dialog strategis untuk mempromosikan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi, efektivitasnya dalam menghadapi dinamika global masih terbatas. Kelemahan struktural, seperti sifat konsensus non-mengikat, dominasi dua kekuatan besar (AS dan Tiongkok), serta ketimpangan kepentingan antara negara anggota besar dan kecil, menghambat kemampuan forum ini untuk menghasilkan kebijakan yang konkret dan terkoordinasi secara menyeluruh. Ketegangan geopolitik yang intensif memperburuk fragmentasi geoekonomi, memaksa negara-negara kecil untuk mengandalkan pendekatan bilateral daripada mekanisme multilateral.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan potensi APEC sebagai aktor multilateral yang relevan dalam mitigasi dampak perang dagang melalui pendekatan yang lebih inklusif dan terfokus. Upaya APEC dalam memfasilitasi liberalisasi perdagangan, meskipun terhambat oleh berbagai kendala, tetap memberikan ruang untuk dialog yang berorientasi pada solusi kolektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada aplikasi teori efektivitas rezim Arild Underdal, yang menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas penyelesaian masalah (problem-solving capacity) melalui penguatan struktur institusi, peningkatan kolaborasi strategis, dan distribusi kekuasaan yang lebih merata di antara negara-negara anggota.

Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mencakup pengkajian mekanisme evaluasi terpusat untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif, serta eksplorasi peran kepemimpinan strategis dalam menyatukan kepentingan negara anggota. Dengan memperkuat komitmen terhadap kerjasama multilateral dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar, APEC dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai rezim internasional yang berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

VI. REFERENSI

- [1] Andreas, E., Vasquez, G., & Chen, T. (2024). *Win, Lose or Draw: Estimating the Impact of Trade Disengagement on APEC Trade* (60) [APEC POLICY SUPPORT UNIT POLICY BRIEF]. APEC. <https://www.apec.org/publications/2024/05/win--lose-or-draw--estimating-the-impact-of-trade-disengagement-on-apec-trade>
- [2] Anwar, S. A., & Jabnoun, N. (2001). APEC: Evidence and Implications for Policy. *Foreign Trade Review*, 35(4), 17–29. <https://doi.org/10.1177/0015732515010402>
- [3] Asia Pacific Economic Cooperation Forum (APEC): Declaration of Common Resolve. (1995). *International Legal Materials*, 34(3), 758–763. <https://doi.org/10.1017/S0020782900016521>
- [4] Capie, D., Hamilton-Hart, N., & Young, J. (2020). Economics-Security Nexus in the US-China Trade Conflict decoupling dilemmas. *Policy Quarterly*, 16(4). <https://doi.org/10.26686/pq.v16i4.6627>
- [5] Cardenas, L. C., & Buranakanits, A. (1999). The Role of APEC in the Achievement of Regional Cooperation in Southeast Asia. " *Annual Survey of International & Comparative Law*, 5(1).
- [6] Chia, S. Y. (2009). Comment on "Politics of Trade in the USA and in the Obama Administration: Implications for Asian Regionalism." *Asian Economic Policy Review*, 4(2), 246–247. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2009.01129.x>
- [7] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition). SAGE.
- [8] DW. (2018, November 17). *US and China exchange trade war jibes*. Dw.Com. <https://www.dw.com/en/apec-summit-sees-china-and-us-at-odds-over-trade-war/a-46337163>
- [9] Fajgelbaum, P., & Khandelwal, A. (2021). *The Economic Impacts of the US-China Trade War* (w29315; p. w29315). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w29315>
- [10] Hur, J., & Lee, H.-H. (2017). APEC HAS INDEED CREATED INTRA-REGIONAL TRADE: A SYSTEMATIC EMPIRICAL ANALYSIS. *The Singapore Economic Review*, 62(05), 1077–1095. <https://doi.org/10.1142/S0217590815501039>
- [11] Idrus, P. G., Musyaffa, I., & Latief, M. N. (2020, November 23). *Menguji kekuatan APEC di tengah rivalitas AS-China*. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/menguji-kekuatan-apec-di-tengah-rivalitas-as-china/2052891>
- [12] Itakura, K. (2020). Evaluating the Impact of the US-China Trade War. *Asian Economic Policy Review*, 15(1), 77–93. <https://doi.org/10.1111/aep.12286>
- [13] Ivanov, P. (2018, November 19). *APEC: Fail*. <https://asiasociety.org/australia/apec-fail>
- [14] Kennedy, S. (2024). *U.S.-China Relations in 2024: Managing Competition without Conflict*. <https://www.csis.org/analysis/us-china-relations-2024-managing-competition-without-conflict>
- [15] Khold, M. (2022). The US-China Trade War Phenomenon (2018-2020) In Economic Diplomacy Perspective. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1), 83–97. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.38488>
- [16] Li, M. (2020). The Belt and Road Initiative: Geoeconomics and Indo-Pacific security competition. *International Affairs*, 96(1), 169–187. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz240>
- [17] Lincoln, E. J., & Flamm, K. (1997, November). *Time to Reinvent APEC*. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/time-to-reinvent-apec/>
- [18] Magnier, M., & Patrick, I. (2024, November 13). *Asia-Pacific to see slowing economic growth amid trade tensions: Apec*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/china/article/328630>

2/asia-pacific-see-slowing-economic-growth-amid-trade-tensions-policy-uncertainty-apec

- [19] Miles, E. L., Andresen, S., Carlin, E. M., Skjærseth, J. B., Underdal, A., & Wettestad, J. (2001). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/2784.001.0001>
- [20] Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (Seventh edition, Pearson new international edition). Pearson.
- [21] Phijaisanit, E. (2024). Can APEC Bridge the Divide? A Game Theory Approach to US-China Cooperation. *Asian Journal of Applied Economics*, 31(2), 65–76.
- [22] Pusdatin. (2024). *Gelar Diskusi Publik, Tim Kajian BSK Kumham Paparkan Naskah Prakebijakan Kajian “Evaluasi Implementasi Kebijakan KPP APEC di Indonesia.”* Kemenkumham.Go.Id. <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-utama/gelar-diskusi-publik-tim-kajian-bsk-kumham-paparkan-naskah-prakebijakan-kajian-evaluasi-implementasi-kebijakan-kpp-apec-di-indonesia>
- [23] Rizkiyana, R. (2022). *ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIAVIETNAM DALAM MENANGANI AKTIVITAS ILEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING DI PERAIRAN NATUNA TAHUN 2018-2021* [Thesis, Bosowa University]. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2993/2022%20RISHA%20RIZKIYANA%204518023028%20%282%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- [24] Samuel, P. (2022, June 3). *Vietnam’s Diversification of Trade and the China Plus One Strategy*. Vietnam Briefing News. <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-diversification-of-trade-and-the-china-plus-one-strategy.html/>
- [25] Vu, V.-H., Soong, J.-J., & Nguyen, K.-N. (2022). The Political Economy of China’s Rising Role in the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Strategies and Instruments of the Chinese Way. *The Chinese Economy*, 55(4), 255–267. <https://doi.org/10.1080/10971475.2021.1972544>
- [26] Xiao, T. (2024, November 22). *China-Malaysia Economic Ties: Trade, Investment, and Opportunities*. <https://www.china-briefing.com/news/china-malaysia-closer-economic-ties-and-opportunities/>
- [27] Zhou, Y. (2023). The US-China Trade War and Global Value Chains. *World Bank*.